

Term of Reference

Pertemuan Pemerintah Provinsi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Mitra OXFAM “Kolaborasi Pemerintah dan Aktor Non Pemerintah dalam Pembangunan Partisipatif untuk Mendukung Pencapaian SDGs”

Perkumpulan PRAKARSA dan Oxfam di Indonesia

Bogor, 14 Maret 2019

Pendahuluan

Pasca reformasi, demokratisasi mengalami kemajuan. Relasi negara dengan warga membaik, hak sipil politik warga lebih terjamin, pelayanan publik makin baik, dan kesejahteraan meningkat. Pemerintah menjadi aktor kunci dalam upaya memajukan kepentingan publik, baik secara langsung maupun dengan cara membuat kebijakan yang bersinergi dengan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga memiliki kontribusi positif dalam menyuarakan kepentingan publik dan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pendekatan kolaboratif antara aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah perlu diperkuat.

Namun, sejumlah tantangan masih tetap ada. Di Indonesia, partisipasi publik yang memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam politik termasuk dalam dialog perencanaan serta pelaksanaan kebijakan publik masih sebatas formalitas. Partisipasi publik di Indonesia belum memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik dan sumber daya yang dimiliki oleh negara meski dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan partisipasi publik. Sebagai contoh,

Musrenbang yang merupakan ruang partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan paling masif masih belum menjamin akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan OMS di beberapa kelompok kerja di K/L juga masih kurang efektif dalam mengagregasi dan mengakomodasi suara-suara OMS. Pun, posisi OMS juga masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan-penganggaran sampai implementasi-evaluasi. Tidak-adanya kerangka legal atas forum dialog permanen yang mencerminkan “*co-govern*” antara pemerintah dan OMS serta swasta menjadi pekerjaan rumah yang berat.

Demi menjaga keberlangsungan demokrasi serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penting. Kemitraan yang kuat antara pemerintah dan OMS adalah hal yang tidak terelakkan dalam menjamin bahwa agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Perkumpulan PRAKARSA sebagai organisasi *think-tank* memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah melalui usulan-usulan kebijakan yang inovatif melalui kajian-kajian dan kerja-kerja dalam arena multi-stakeholder. Seperti halnya organisasi masyarakat sipil yang lain, PRAKARSA berupaya untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah agar rekomendasi yang disampaikan mendapat respon positif serta menjadi input nyata dalam perbaikan kebijakan. Di sisi yang lain, organisasi masyarakat sipil juga perlu mempertahankan daya kritisnya agar menjadi penyeimbang pemerintah dalam mengelola negara. Upaya pemerintah dalam melihat dinamika perkembangan organisasi masyarakat sipil perlu dipastikan untuk tidak mengarah pada kontrol yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karenanya, untuk merespon perkembangan relasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, Perkumpulan PRAKARSA menilai perlu adanya pertemuan untuk membangun konsolidasi OMS, khususnya mitra strategis OXFAM dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan hubungan sinergis dalam mencapai visi untuk dunia yang adil tanpa kemiskinan di mana semua orang tanpa

terkecuali dihargai dan diperlakukan secara setara, menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.

Tujuan

Pertemuan Pemerintah Provinsi dengan OMS Mitra OXFAM ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan agenda strategis untuk mendukung pencapaian SDGs dari hasil Pertemuan Pimpinan OMS Mitra OXFAM;
2. Memperkuat kemitraan OMS mitra OXFAM di Indonesia dengan Pemerintah Daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

Output

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Disepakatinya agenda atau isu prioritas dan kerja sama yang lebih baik, inklusif, dan selaras dengan agenda pembangunan global, nasional dan daerah antara OMS dengan pemerintah;
2. Disepakatinya langkah-langkah untuk memperkuat kemitraan strategis antara OXFAM dan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Tempat dan waktu:

Pertemuan strategis ini akan dilaksanakan di Aston Bogor Hotel & Resort Bogor Nirwana Residence, Jl. Dreded Pahlawan, Mulyaharja Bogor Selatan, Jawa Barat 16132 pada tanggal 14 Maret 2018.

Agenda

Kamis, 14 Maret 2019	Kegiatan	PIC
	Dialog dengan Pemerintah Provinsi	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan	Fasilitator
09.00 – 10.30	Penyampaian hasil pertemuan CSO	Fasilitator
10.30 – 12.00	Diskusi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Fasilitator
12.00 – 13.00	Makan Siang	Panitia

13.00 – 14.30	Membangun Kesepakatan Kolaborasi dalam Implementasi SDG's.	Fasilitator
14.30 – 15.00:	Penutupan	Panitia

Peserta:

Pertemuan dengan pemerintah akan dihadiri oleh perwakilan OMS sebagai tim perumus dan perwakilan Pemerintah Provinsi, BAPPEDA, dan Dinas Sosial Provinsi yaitu:

1. Gubernur Provinsi :

- H. Mochammad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. Provinsi Jawa Barat
- Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si Provinsi Jawa Timur
- Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr Provinsi Sulawesi Selatan
- H. Ali Mazi, SH Provinsi Sulawesi Tenggara
- Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Provinsi Sulawesi Tengah
- Dr. H. Zulkieflimansyah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Victor Bungtilu Laiskodat Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Kepala Bappeda Provinsi :

- Dr. Ir. H. M. Taufiq Budi Santoso, M. Soc. Sc. Provinsi Jawa Barat
- Dr. Bobby Soemiarsono, SH, M.Si Provinsi Jawa Timur
- Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. Provinsi Sulawesi Selatan
- Ir. J. Robert, M.TP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE Provinsi Sulawesi Tengah
- Ir. Ridwan Syah, MSc., MM., MTP Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Lucky F Koli Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Dinas Sosial Provinsi

- dr. H. Dodo Suhendar, MM Provinsi Jawa Barat
- Dr. Sukesi, Apt. MARS Provinsi Jawa Timur
- Dr. H. Ilham A Gazaling, M.Si Provinsi Sulawesi Selatan
- Drs. Armunanto Provinsi Sulawesi Tenggara
- Drs. Ridwan Mumu, M.Si Provinsi Sulawesi Tengah
- Ahsanul Halik. S.Sos, MH Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Drs. Hamka A Haris Weru MM

Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Pimpinan OMS sebagai Tim Perumus :

- Sutriyatmi (Koalisi Perempuan Indonesia)
- Said Abdullah (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan)
- Deny Rahardian (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif)
- Tatat Sukarsa (INFID)
- Khairul Fahmi (Jemari Sakato Padang)

5. Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa)

6. Danardono S. (Fasilitator)

7. Siti Khoirun Nikmah (OXFAM)